

## Pengawasan dan Pencegahan Korupsi terhadap Dinasti Politik di Daerah

Oleh:

Dr. W. Riawan Tjandra, S.H., M.Hum.

### Pengertian Dinasti Politik

- Sebuah kekuasaan politik yang dijalankan oleh sekelompok orang yang masih terkait dalam hubungan keluarga.
- Pengertian dinasti politik banyak merujuk ke studi ilmu politik. Teresa Tadem dan Eduardo Tadem, para profesor Ilmu Politik dari Universitas Filipina, dalam presentasinya berjudul *Political Dynasties in the Philippines: Persistens Patterns, Perennial Problems*, misalnya menyatakan, dinasti politik mengacu pada praktik politik yang dilakukan oleh sebuah keluarga dalam memonopoli kekuasaan. Lebih lanjut ditegaskan, tindakan monopoli kekuasaan dilakukan dari generasi ke generasi dengan memperlakukan lembaga publik layaknya milik pribadi keluarga.

### 3 Model Dinasti Politik

- Pertama, adalah model dinasti politik regenerasi yang modelnya seperti "arisan keluarga". Yakni, satu keluarga memimpin satu daerah tanpa jeda.
- Kedua, adalah dinasti politik lintas kamar dengan cabang kekuasaan. Misal, sang kakak menjadi bupati daerah tertentu, sang adik Ketua DPRD, dan anggota keluarganya yang lain memegang posisi Kepala Dinas yang strategis.

### Penyebab Munculnya Dinasti Politik

- Adanya keinginan Dalam diri atau pun keluarga untuk memegang kekuasaan.
- Adanya kelompok terorganisir karena kesepakatan dan kebersamaan Dalam kelompok sehingga terbentuklah penguasa kelompok dan pengikut kelompok.
- Adanya kolaborasi antara penguasa dan Pengusaha untuk mengabungkan kekuatan modal dengan kekuatan Politisi.
- Adanya Pembagian tugas antara kekuasaan politik dengan kekuasaan Modal Sehingga Mengakibatkan terjadinya KORUPSI

## Lanjutan

- Ketiga, adalah model lintas daerah. Dimana satu keluarga memegang jabatan penting di berbagai daerah yang berbeda.

## Aspek Negatif

- Dinasti politik umumnya bermakna negatif karena biasanya terkait dengan korupsi. Korupsi yang dilakukan dinasti politik mengesankan korupsi yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM). Tingkat kerusakan dan bahaya yang ditimbulkannya menjadi berlipat dibandingkan dengan korupsi yang dilakukan orang per orang.

## Aspek Positif

- Di sejumlah negara, dinasti politik tidak selalu berarti korupsi. Singapura adalah contohnya. Salah satu pemegang kekuasaan di negeri tersebut adalah dinasti politik. Lee Kuan Yew membangun Singapura, menjadi pemimpinnya untuk waktu yang cukup lama, lalu penguasa berikutnya adalah anggota keluarganya.
- Namun, dinasti politik di Singapura tak dapat dikaitkan langsung dengan korupsi. Singapura dikenal sebagai negara yang penegakan hukumnya sangat baik, terutama dalam hal pencegahan dan pemberantasan korupsi. Menurut Transparansi Internasional, Singapura memperoleh peringkat delapan terbaik dalam Indeks Persepsi Korupsi 2016

## Tak Cocok dengan Demokrasi

- Dinasti politik tidak cocok dan cenderung bertentangan dengan demokrasi. Prinsip dinasti adalah pemusatan kekuasaan. Ini bertentangan diametral dengan demokrasi yang justru berpijak pada desentralisasi kekuasaan, baik secara vertikal maupun horizontal. Kekuasaan yang terpusat cenderung dekat dengan kekuasaan absolut. Kekuasaan absolut cenderung korup secara absolut pula. Inilah alasan fundamental mengapa dinasti politik dicurigai berjaln berkelindan dengan korupsi

## Syarat Terbentuknya Dinasti Politik

- Pertama, ada sebuah keluarga. Syarat keluarga tak bisa begitu saja dibatasi bahwa si pemegang kekuasaan politik menurunkan dominasi kekuasaan ke anggota keluarganya yang memiliki nasab langsung. Akan tetapi, keluarga juga dapat disimpulkan dengan sebuah relasi yang terbangun erat antara si pemegang kuasa dengan calon penerus estafet kekuasaannya. Relasi tersebut bisa berbentuk hubungan ekonomi—dan biasanya hubungan inilah yang terjadi. Artinya, subjek dinasti politik tidak melulu berasal dan disemai dalam lingkup keluarga besar yang senasab, melainkan juga lahir dan dibesarkan oleh keluarga di luar nasab langsung (relasi) yang berpokok dari dukungan sumber daya ekonomi.
  
- Kedua, ialah terdapat praktik atau tindakan politik untuk memonopoli atau mendominasi kekuasaan yang dilakukan secara turun-temurun. Pada bagian ini, yang ditekankan adalah bagaimana cara dinasti politik itu mempertahankan kekuasaannya. Dalam era demokrasi, upaya menjaga kekuasaan yang dilakukan oleh dinasti politik adalah dengan memanipulasi pemilihan umum. Seakan-akan pesta rakyat telah diselenggarakan dengan benar dan jujur, tetapi kenyataannya pemilihan kepala pemerintahan hanya sekadar pesta formil di mana hasil akhirnya telah ditentukan sebelumnya.

- Ketiga, tujuan praktik monopoli kekuasaan tersebut adalah menjadikan kantor publik—dan semua kebijakannya—sebagai properti keluarga. Kekuasaan pemerintahan dimaktubkan dalam penerbitan kebijakan. Dinasti politik mengarahkan bagaimana kebijakan pemerintahan dapat menguntungkannya. Proyek atas nama kebutuhan rakyat digelar dengan menyisipkan rente bagi dinasti politik.

### 3 mekanisme terbentuknya dinasti politik

- Pertama, transmisi atau suksesi—baik langsung maupun tidak langsung—kekuasaan politik atas dasar hubungan keluarga (Thompson, 2012).
- Kedua, dinasti politik terbentuk karena ada persistensi elite (Querubin, 2011). Satu atau sejumlah kecil keluarga mendominasi distribusi kekuasaan di suatu tempat/negara.

## Lanjutan

- Ketiga, dinasti politik juga dapat terbentuk melalui suksesi langsung, misalnya jabatan politik beralih dari ayah kepada anak, atau dari suami kepada istri, dalam pergantian kepemimpinan di suatu tempat (Rahman, 2013). Dinasti politik terbentuk apabila terdapat minimal dua anggota keluarga yang memegang jabatan politik yang sama, di tingkat nasional ataupun daerah secara berturut-turut.

## Pintu Masuk Korupsi

- Yoes C. Kenawas dalam tulisannya berjudul *The Rise of Political Dynasties in a Democratic Society* memotret banyak dinasti politik di negeri ini mengakumulasi sumber dayanya melalui pengumpulan kekayaan dengan melawan hukum (*illicit funding*) melalui korupsi anggaran, uang pelicin, dan/atau imbal balik (*kickback*) atas proyek pemerintah. Tak hanya itu, lanjut Kenawas dengan mencuplik Gibson (2015), dinasti politik juga menggunakan jaringan keluarga serta kekayaannya untuk menghadang intrusi—maupun potensi gangguan—yang berasal dari aktor politik lainnya (*boundary control*).

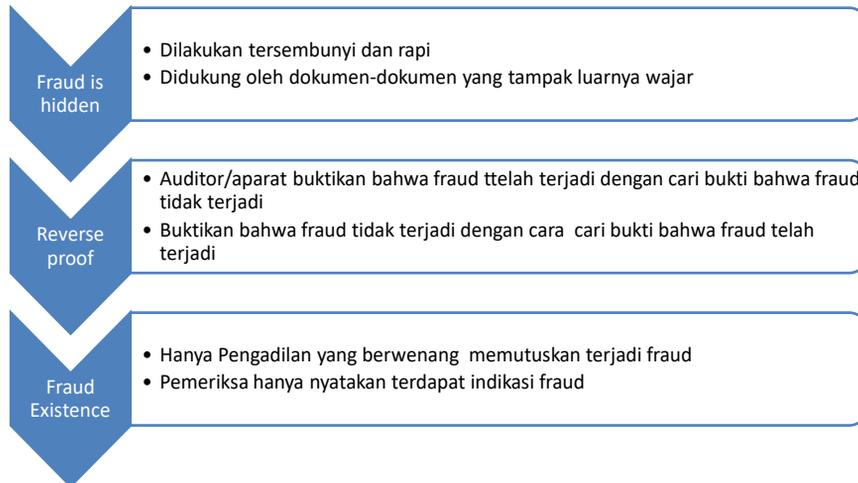
## Praktik Empiris

- Potensi korupsi terhadap dinasti politik itu sangat memungkinkan berdasarkan praktik empiris, seperti kasus gubernur Banten, kasus dugaan korupsi Bupati Empat Lawang, di Bangkalan, dan lain-lain

## Akar Korupsi Politik



## Aksioma Fraud



## Karakteristik White Collar Crime

Dilakukan orang dengan kompetensi tertentu

Dilakukan tersembunyi dengan tingkat kompleksitas tinggi

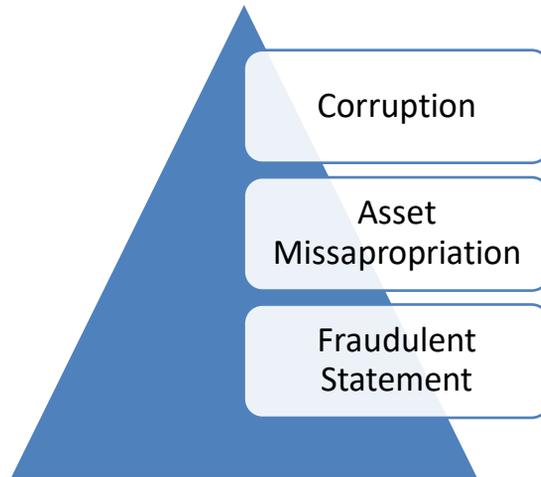
Tak bersifat fisik dgn menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan oleh orang lain

Pelaku memiliki status sosial, jabatan serta pekerjaan yang baik

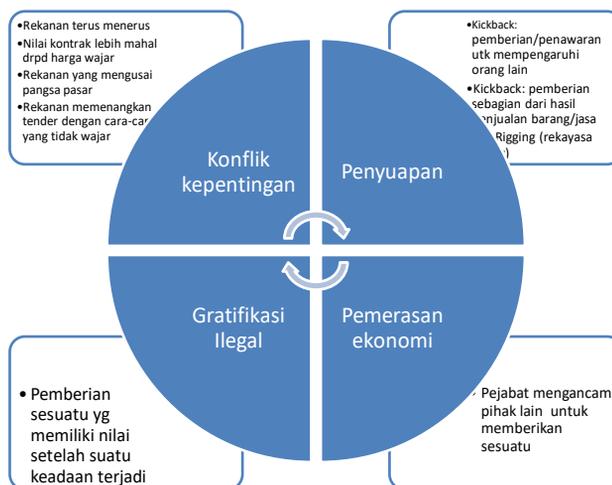
Kejahatan yang dilakukan sulit dideteksi

Mencari keuntungan tertentu

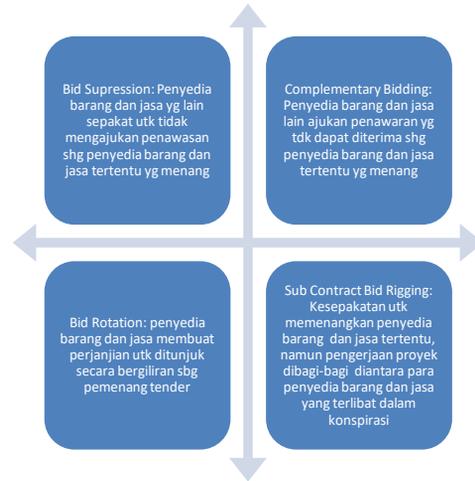
## Kategorisasi Fraud



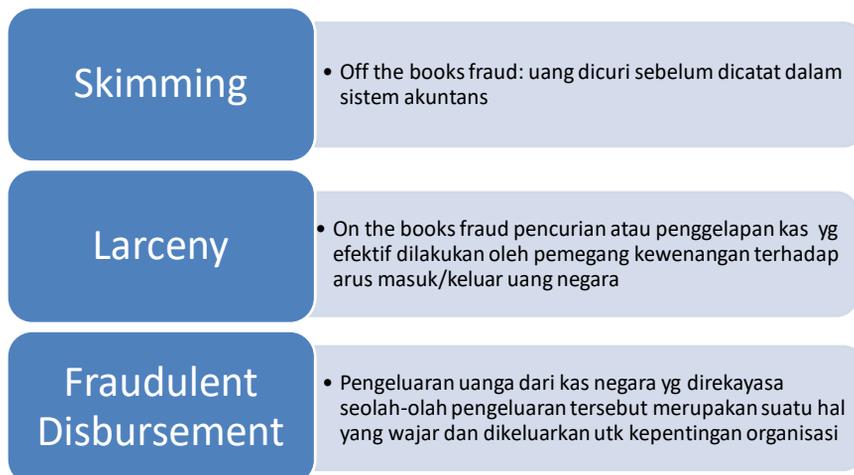
## Corruption



## Bid – Riddging (Rekayasa Proses PBJ)



## Asset Misappropriation



## Piranti Pengawasan Anti Korupsi

### Profil Assessment

- rekrutmen, mutasi dan promosi berdasarkan kompetensi dan integritas (merit system) guna meningkatkan mutu SDM

### Citizen's charter

- Komitmen atas layanan publik yang responsif terhadap tanggapan dan masukan publik

### Kode Etik

- Pedoman yang memuat komitmen institusi dalam memberantas korupsi

## Lanjutan

### Mekanisme kontrol sosial

- Melalui mekanisme mengedepankan partisipasi publik, pemerintah dpt didorong utk bekerja lebih efisien, baik dlm konteks waktu maupun biaya

### Mekanisme pelaksanaan keterbukaan informasi

- Memberikan jalur akses dokumen-dokumen, kecuali yg dirahasiakan, agar masyarakat dpt turut mengawasi kerja dan kinerja pemerintah

### Mekanisme penanganan pengaduan masyarakat

- Mekanisme ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas instansi ybs dlm pelayanan publik atau penegakan hukum

## Lanjutan

Mobilisasi masyarakat sipil melalui edukasi dan peningkatan kesadaran masyarakat

- Dilakukan dengan cara mendiseminasi perilaku yg diharapkan datang dari pemerintah (pada umumnya) atau pejabat (pada khususnya) dlm rangka meningkatkan akuntabilitas penyedia layanan

Pakta Integritas

- Pakta formal yang berisi komitmen utk melaksanakan tugas, fungsi, tanggung jawab, wewenang, dan peran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kesanggupan utk tidak melakukan KKN.

Pengaturan konflik kepentingan

- Pejabat diwajibkan utk mengungkapkan kepentingan pribadinya ketika timbul konflik kepentingan dan memastikan bahwa tindakan yg dilakukannya memang utk meniadakan konflik kepentingan tersebut

## Lanjutan

Penggunaan insentif positif utk perbaiki budaya dan motivasi pegawai

- Dilakukan dengan meningkatkan remunerasi/kompensasi, memperbaiki status profesional, job security dan kondisi kerja.

Penguatan lembaga yudisial

- Peningkatan kompetensi, profesionalisme dan integritas hakim untuk memberantas korupsi. Dilakukan melalui: pelatihan hakim, implementasi kode etik hakim, transparansi proses persidangan, transparansi harta dan penghasilan hakim .

Penguatan Pemda

- Mengefektifkan strategi anti korupsi di daerah, integrasi perangkat yang digunakan di daerah secara vertikal (dgn Pusat) dan horizontal (dgn Pemda lain).

## Lanjutan

### Pengurangan kompleksitas prosedural

- Penataan ulang administratif, reformasi birokrasi dan memangkas prosedur administratif serta memperjelas wewenang disertai peningkatan transparansi, integritas, pelayanan dan mengurangi biaya.

### Perlindungan bagi Whistle blower dan justice collaborator

- Perlindungan ini diperlukan untuk mendorong pengungkapan tipikor

### Proses pelayanan publik dan pengadaan barang dan jasa berbasis TI

- Hal ini memperkecil interaksi antar manusia yang ujung-ujungnya mempersempit peluang terjadinya tipikor

## Lanjutan

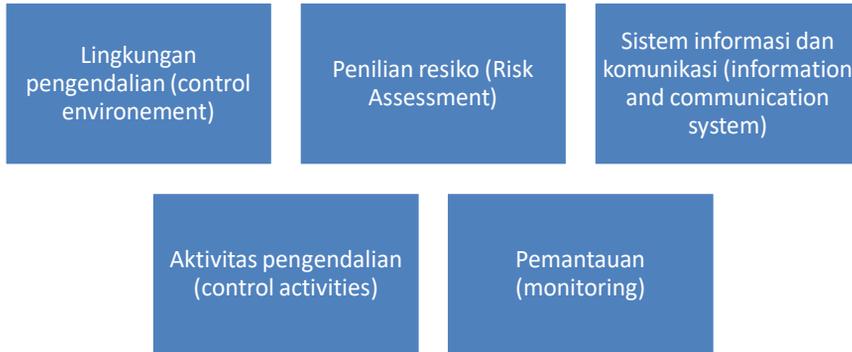
### Transparansi serta penyingkapan aset dan penghasilan

- Pelaksanaan ini dimaksudkan untuk menjadi pintu masuk bagi penerapan aturan mengenai perolehan harta kekayaan pejabat publik yg tidak wajar

### Uji Integritas

- Uji integritas dilakukan secara mendadak ddgn menngondisikan suatu situasi tertentu tempat pegawai yang bersanagkutan memiliki kesempatan untuk melakukan tipikot. Hal itu utk mengetahui kemungkinan seorang pegawai terlibat praktik korupsi. Uji integritas juga dimaksudkan memberbesar resiko tertangkapnya pelaku agar menimbulkan efek jera.

## 5 Unsur Pengendalian Intern



**MATUR NUWUN**